BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ekonomi dan sosial Indonesia yang belum teratasi dari dulu hingga saat ini yaitu, tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tinggi tetapi, tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang memadai. Pengangguran menjadi dampak yang di akibatkan dari kurang tersedianya lapangan pekerjaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti saat ini. Namun, kebutuhan sandang, pangan, papan bahkan kebutuhan tersier harus tetap terpenuhi dan di abad 21 ini kebutuhan teknologi tidak lepas dari tiap individu. Hal tersebut mendorong masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan kerja untuk mencoba mencari pekerjaan di luar negeri dengan maksud mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi.

Saat ini migrasi internasional umum dilakukan oleh penduduk semua negara, begitu juga penduduk Indonesia. Motif dasar individu atau kelompok untuk migrasi internasional biasanya didasarkan pada masalah ekonomi yang melanda, diantaranya yaitu masalah pengangguran.[1] Untuk mengatasi krisis lapangan kerja dalam negeri sebagai bentuk upaya dari

[1] Firman Syarifulloh. *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)".* Universitas Brawijaya. 2015. Hlm 4.

pengurangan angka pengangguran, salah satunya pemerintah membuat kebijakan untuk membuka peluang kerja ke luar negeri bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Beberapa negara asing memiliki perekonomian yang lebih maju tetapi, penawaran tenaga kerjanya lebih sedikit dibanding permintaannya. Sehingga untuk mencukupi lapangan pekerjaan dalam negeri, negara tersebut membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Potensi itu dimanfaatan pemerintah Indonesia untuk mengirimkan para TKI demi mengatasi masalah lapangan kerja yang ada.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah dan peluang dimanfaatkan oleh penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang mencapai 3,5 juta orang di akhir tahun 2017. Mayoritas TKI berprofesi sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi) 35%, pekerja perkebunan 19%, dan pekerja konstruksi 18%.[2]

Kabupaten Indramayu merupakan daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Indramayu, jumlah TKI asal Kabupaten Indramayu pada tahun 2016, mencapai sekitar 16 ribu orang dan jumlah itu bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 mencapai 17.658 orang dari jumlah tersebut, 14.667 orang di antaranya adalah

[2] Pepri Saputra, "TKA vs TKI Fakta dan Data", https://katadata.co.id/infografik/2018/05/07/tka-vs-tki-fakta-dan-data (diakses 29 Desember 2018, pukul 22.15 WIB).

wanita.[3] Selanjutnya hasil rekapitulasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Kabupaten Indramayu tahun 2018 berjumlah 22.398 orang dari jumlah tersebut 19.080 orang adalah wanita dan 3.318 orang pria.[4] Selisih jumlah jenis kelamin pekerja Indonesia yang keluar Negeri hasilnya lebih banyak wanita dibanding pria yang artinya lebih banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pekerjaan yang dominan di ambil oleh para TKW ini adalah Pengasuh (*Caregiver*) 8.814 orang, *Domestic Worker* 2.564 orang, dan pembantu (*Housemaid*) 5.672 orang.[5]

Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Indramayu menjadikan masyarkat merantau dan bekerja di luar daerah asalnya. Seperti yang telah di sebutkan Disnaker, TKI yang mendominasi di Kabupaten Indramayu adalah wanita. Wanita bekerja atau mengambil peran di ranah domestik, yaitu bertanggung jawab penuh pada segala tata kelola dalam urusan rumah tangga.[6] Sehingga hal ini memperkuat data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyebutkan profesi pekerja domestik paling banyak di lakukan oleh para TKI asal Indonesia.

Menjadi seorang TKW harus melalui prosedural mulai dari pendaftaran ke Disnaker, pengumpulan berkas seperti ijazah, surat keterangan sehat, SKCK, surat keterangan izin dan syarat lainnya. Apabila seorang TKW tidak melalui prosedur yang tepat dia menjadi TKW ilegal.

---

[3] Lilis Sri Handayani, *Mayoritas TKI Asal Indramayu Perempuan*, https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/08/29/pe7yf6366-mayoritas-tki-asal-indramayu-perempuan (diakses 29 Desember 2018, Pukul 22.54 WIB).
[4] Data Rekapitulasi Pendaftaran CPMI Tahun 2018 Per Jabatan, Kabupaten Indramayu
[5] *Ibid.*,
[6] Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang : UB Perss, 2017), hlm. 17-18.

Pendaftaran berbelit dan banyaknya berkas membutuhkan waktu serta tenaga lebih, hal ini sering kali menyulitkan bagi TKW. Kesulitan TKW ini dimanfaatkan oleh para calo yang merupakan tangan kanan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk merekrut para TKW. Walaupun PJTKI adalah legal namun pendaftaran melalui calo terdapat kerugian yaitu, pemotongan gaji yang bervariasi terhadap TKW ketika sudah bekerja di luar Negeri. Namun, karena berbagai alasan TKW di Desa Dukuh Jeruk tetap lebih memilih mendaftarkan dirinya. Padahal Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menyediakan situs bagi para warga yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi TKI/W.

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya interaksi antara TKW dengan calo memberikan keuntungan. Tidak hanya calo yang mendapatkan keuntungan dari TKW yang membutuhkan jasanya, tetapi TKW pun mendapatkan kemudahan dengan mendaftar melalui calo.

Menurut penelitian Feri Kristiana Wati pada tahun 2011 yang berjudul peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal Desa Karangrowo ke luar negeri, peran calo sangatlah dominan dan penting. Di mana, sejak awal perekrutan di desa dan pengurusan dokumen yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri menjadi tanggung jawab calo tenaga kerja sepenuhnya hingga calon TKI/TKW sampai kepada pengguna

jasa tenaga kerja (PPTKIS/majikan di negara tujuan).[7] Hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi para TKI/TKW, karenanya penelitian ini mecoba mencari dampak interaksi TKW dan Calo yang terjadi di Desa Dukuh Jeruk dari adanya calo di desa ini. Interaksi dilakukan oleh Calo dengan TKW tentunya bisa menguntungkan dan merugikan bagi salah satunya, kecakapan dalam berinterasi menentukan hasil yang diperoleh.

Secara umum alasan banyaknya wanita terutama dari pedesaan memilih bekerja menjadi TKW untuk bisa memperbaiki kehidupannya baik dalam segi ekonomi maupun sosial, karena mayoritas TKW adalah keluarga yang berada pada stuktur ekonomi rendah. Selain itu gengsi pekerjaan dan lingkungan, mendukung para wanita untuk berlomba-lomba dalam bekerja agar meningkatkan status sosial mereka. Walaupun terdapat resiko salah satunya yaitu, terdapat pemotongan gaji tetapi persyaratan TKI wanita juga lebih dipermudah dibandingkan dengan laki-laki.

Akan tetapi, dalam Proses Penyaluran TKI/TKW ke luar Negeri menyebutkan kenyataan di lapangan justru menjukkan fenomena lain dalam kehidupan TKW ketika mereka kembali ke daerah asal. Hal tersebut diperkuat dalam penelitian Indah Wulandari tahun 2013 berjudul pola perilaku konsumtif tenaga kerja wanita ketika kembali ke daerah asal di Kabupaten Blitar yang menyebutkan bahwa meski mereka mampu

[7] Feri Kristiana Wati, "Peran Calo Tenaga Kerja dalam Proses Penyaluran TKI/TKW ke Luar Negeri" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011). Hlm.103.

menghasilkan banyak uang dari bekerja di luar negeri, tetapi tidak semua TKW bisa memperbaiki keadaan kehidupannya.[8] Banyak diantara mereka yang cenderung berperilaku konsumtif ketika kembali ke daerah asal dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial ekonimi keluarganya sehingga lebih dipandangan masyarakat. Jadi, tidak mengherankan apabila kehidupan mereka terlihat seperti sejahterah dan mewah tetapi, salah satu keluarganya masih dan tetap menjadi TKW. Bisa dikatakan TKW sudah menjadi pekerjaan utamanya. Apabila sudah kembali ke daerah asalnya akan bekerja kembali menjadi TKW. Hal ini juga yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Penelitian Indah Wulandari tahun 2013 berjudul pola perilaku konsumtif tenaga kerja wanita ketika kembali ke daerah asal di Kabupaten Blitar salah satu yang mendasari penelitian ini. Seperti yang terjadi pada TKW asal Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, selain maraknya pendaftaran TKW melalui calo, periaku hidup konsumtif dan sikap mengutamakan gaya hidup dilakukan mantan dan/atau keluarga TKW untuk meningkatkan status sosial ekonomi sehingga dapat dipandang sebagai TKW yang sukses. Uang yang mereka hasilkan semata untuk meningkatkan status sosialnya, sehingga dalam sekejap uangnya akan habis tanpa sisa.

[8] Indah Wulandari, *Pola Perilaku Konsumtif Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ketika Kembali ke Daerah Asal Di Kabupaten Blitar* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2013). Hlm 4.

Selain itu, penelitian Feri Kristiana Wati pada tahun 2011 yang berjudul peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal Desa Karangrowo ke luar negeri, juga menjadi dasar saya dalam melakukan penelitian ini, karena calo berperan sangat dominan dalam pekerjaan sebagai TKW. Namun, yang menjadi perbedaan dengan penelitian dari Feri Kristiana Wati adalah lokasi yang diteliti Wati adalah di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, selain itu fokus dari penelitian ini tidak hanya terfokus pada calo dan TKW saja, tetapi juga kepada peningkatan status sosial ekonomi dan bagaimana interaksinya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba untuk mengadakan penelitian tentang "Interaksi Sosial Antara Tenaga Kerja Wanita dengan Calo untuk Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Di Desa Dukuh Jeruk, Kabupaten Indramayu."

B. Masalah Penelitian

Tenaga Kerja Wanita dan calo dalam meningkatkan status sosial ekonomi memiliki interaksi yang saling tergantung antara keduanya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memiliki beberapa hal yang akan dijadikan sebagai permasalahan yaitu:

1. Mengapa wanita di Desa Dukuh Jeruk yang berada pada struktur status sosial ekonomi rendah, memilih bekerja menjadi TKW melalui calo?

2. Bagaimana interaksi calo dalam meyakinkan wanita di Desa Dukuh Jeruk, Kabupaten Indramayu untuk menjadi TKW dengan upaya peningkatan status sosial ekonomi?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian masalah penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian adalah interaksi sosial antara tenaga kerja wanita dengan calo untuk meningkatkan status sosial ekonomi di desa dukuh jeruk, kabupaten indramayu. Fokus penelitian ini adalah:

1. Alasan wanita di Desa Dukuh Jeruk, Kabupaten Indramayu memilih bekerja menjadi TKW melalui calo untuk meningkatkan status sosial ekonomi, yaitu:
   a. Faktor internal.
   b. Faktor eksternal.
2. Interaksi sosial yang dilakukan calo dalam meyakinkan wanita Desa Dukuh Jeruk untuk meningkatkan status sosial ekonomi dengan menjadi TKW.
   a. Bentuk interaksi sosial calo dalam meyakinkan wanita untuk menjadi TKW
   b. Bentuk interaksi TKW dengan calo
   c. Faktor- faktor proses interaksi sosial calo dan TKW, yaitu:
      1) Imitasi
      2) Sugesti
      3) Identifikasi

4) Simpati

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Alasan wanita di Desa Dukuh Jeruk, Kabupaten Indramayu memilih bekerja menjadi TKW melalui calo untuk meningkatkan status sosial ekonomi.

   b. Interaksi calo dalam meyakinkan wanita Desa Dukuh Jeruk untuk meningkatkan status sosial ekonomi dengan menjadi TKW.

2. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

   a. Kegunaan Teoretis

      Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu dan sebagai acuan untuk penelitian selancutnya. Selanjutnya dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Interaksi Sosial Antara Tenaga Kerja Wanita dengan Calo untuk Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Di Desa Dukuh Jeruk, Kabupaten Indramayu.

   b. Kegunaan Praktis

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Interaksi Sosial Antara Tenaga Kerja Wanita degan Calo untuk Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Di Desa Dukuh Jeruk,

Kabupaten Indramayu kepada pihak desa dan masyarakat Desa Dukuh Jeruk khususnya para calon TKW sebagai pertimbangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Struktural Fungsional

Penelitian ini berparadigma fakta sosial menggunakan teori struktural fungsional yang pencetusnya adalah Talcot Parsons. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.[9]

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilainilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat

[9] Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern,* (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), hlm 48

adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.[10]

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:[11]

a. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
b. Pencapain tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
c. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).

[10] Richard Grathoff, *Kesesuaianantara Alfred Schutz dan Talcott Parsons:TeoriAksiSosial*, (Jakarta: kencana, 2000), hlm 67-87
[11] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *TeoriSosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 118

d. Pemeliharaan pola (*Latency*): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Apabila dikaitkan dengan penelitian interaksi antara Tenaga Kerja Wanita dan calo untuk meningkatkan status sosial ekonomi di Desa Dukuh Jeruk, Kabupaten Indramayu dengan konsep AGIL Parsons tentang sebuah sistem, sebagai berikut :

a. Adaptasi : sikap, tindakan dan perilaku TKW/keluarga TKW dan calo untuk menyesuaikan lingkungan masyarakatnya, yaitu di Desa Dukuh Jeruk dengan kebutuhan-kebutuhannya.
b. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan) : tujuan TKW dan calo untuk meningkatkan status sosial ekonomi.
c. Integrasi : terjadi interaksi sosial antara calo dan TKW sehingga tercapai tujuan yang ingin dicapai calo dan TKW.
d. *Latensi* (pemeliharaan pola) : antara calo dan TKW memiliki keterkaitan sehingga saling membutuhkan satu dengan lainnya. Meningkatkan status sosial menjadi salah satu motivasi yang melatarbelakangi keduanya.

Masyarakat Desa Dukuh Jeruk antara calo dan TKW memiliki hubungan saling berkaitan dan membutuhkan satu dengan lainnya. Sehingga apabila salah satunya tidak menjalankan fungsinya akan

tercipta ketidak seimbangan dalam stuktur di dalam masyarakat. Saling keterkaitan antara TKW dan calo merupakan bentuk dari adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola yang muncul motivasi ditiap individunya.

2. Konsep Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan Tenaga Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja adalah mereka yang mampu melakukan pekerjaan dan memasuki usia kerja yaitu, antara 15-64 tahun.

Menurut Siamanjuntak dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia" tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah

tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut Simanjuntak hanya dibedakan oleh batas umur.[12]

Menurut beberapa pendapat pengertian tenaga kerja yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Apabila ditinjau secara umum pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.

a. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan.[13] Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu :

---

[12] Sendjun H Manululang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hal 03

[13] Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal 345

1) Berdasarkan Penduduknya

a) Tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

b) Bukan tenaga kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

2) Berdasarkan Batas Kerja

a) Angkatan kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

b) Bukan angkatan kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu

rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

3) Berdasarkan Kualitasnya

a) Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

b) Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.[14]

b. Masalah Ketenagakerjaan

Salah satu masalah mendasar yang dihadapai Indonesia disepanjang perjalanan menjadi bangsa yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai

[14] Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal 45.

upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengganguran dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (productioncontered development). Namun pada kenyataanya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa diatasi oleh pemerintah.[15]

Permasalahan yang timbul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut:[16]

1) Perluasan lapangan pekerjaan
2) Peningkatan mutu dan kemampuan kerja
3) Penyebaran tenaga kerja
4) Perlindungan tenaga kerja

3. Konsep Tenaga Kerja Wanita

Menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan bagian dari TKI, yaitu tenaga kerja dengan jenis kelamin wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Telah dijelaskan bahwa

---

[15] Jannes Eudes Wawa, *Ironi Pahlawan Devisa* (Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2005), hal 39.

[16] Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal IlmuIlmu Sosial Manjemen Konsesnsus Dalam Bisnis, hal 4-7.

TKW merupakan bagian dari TKI yang berjenis kelamin wanita ada beberapa pengertian dari Tenaga Kerja Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya[17]. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

[17] Depnaker, Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenga Kerja, (Jakarta 1994), hal 04

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negata tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah. Lalu TKW merupakan bagian dari TKI dan yang membedakannya adalah jenis kelamin yaitu, TKW pekerjanya adalah wanita dan TKI itu wanita dan laki-laki. Jadi, TKW merupakan istilah yang di berikan kepada pekerja di luar negeri yang berjenis kelamin wanita.

a. Macam-macam Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga kerja Indonesia ada dua macam, yaitu:

1) Tenaga kerja Indonesia melalui BNP2TKI

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Adapun formulir pendaftaran untuk melengkapi persyaratan dan dokumen menurut PP No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu:[18]

a) Terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota (kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK-1));
b) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain;
c) Ijazah pendidikan terakhir;
d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f) Surat keterangan izin dari:
    (1) Suami/istri bagi calon TKI yang menikah;
    (2) Orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda; atau

[18] Peratuan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

(3) Wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

g) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

h) Syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis.

2) Tenaga kerja Indonesia Melalui PJTKI

PJTKI adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki tugas menyalurkan tenaga kerja ke tempat-tempat atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pendaftara harus memenuhi prosedural yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

3) Tenaga kerja Indonesia nonprosedural

Empat penyebab utama terjadinya TKI nonprosedural. Pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, terbatasnya akses informasi pasar kerja dalam dan luar negeri. Ketiga, maraknya praktek percaloan. Penyebab terakhir yaitu praktek migrasi tradisional.[19]

[19] Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia "TKI Legal Prosedural Aman, Selamat, Sejahtera" https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/TKI-Legal-Prosedural-Aman,-Selamat,-Sejahtera-.aspx (diakses 23 Januari 2019, Pukul 21:57 WIB)

b. Negara Tujuan TKI

Banyak negara yang dituju oleh para TKI, namun dari banyak negara yang sering menjadi tujuan adalah negara sebagai berikut:

1) Malaysia
2) Hongkong
3) Taiwan
4) Singapura
5) Arab Saudi
6) Brunei Darussalam[20]

c. Faktor Daya Dorong dan Daya Tarik Tenaga Kerja Indonesia

Menjadi TKI adalah menjadi tenaga kerja di negara lain dengan berbagai tujuan yang telah di jelaskan di atas. Keputusan menjadi TKI didasarkan pada perbandingan untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama menjadi TKI adalah meningkatkan taraf hidup dan keluarganya baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial ekonomi yang lebih baik di negara tujuan.

[20] Annisa Ulfa Damayanti, "11 Negara Tujuan TKI" https://news.okezone.com/read/2018/04/05/337/1882574/11-negara-tujuan-tki-nomor-4-negaranya-paling-kecil (diakses 23 Januari 2019, Pukul 22:17)

Berdasarkan pengelompokannya, maka faktor yang mendorong individu menjadi TKI dibedakan dalam dua kategori, yaitu daya dorong dan daya tarik. Faktor daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumberdaya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.

Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah:

1) Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
2) Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit).

3) Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.

4) Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.

5) Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.[21]

Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain adalah:

1) Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaikan taraf hidup.

2) Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

3) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

4) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orangorang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

d. Dasar Hukum Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI di Luar Negeri)

Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala upaya untuk

[21] Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan Jili 2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal 45.

melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Berdasarkan Pasal 2 UU No No. 39 Tahun 2004, Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKW berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai.
b) Menjamin dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, dinegara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
c) Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah memilki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar negeri.

4. Pengertian Calo

Calo merupakan orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah; makelar; perantara.[22] Peran calo dalam perekonomian sangat penting dan dibutuhkan untuk mempermudah transaksi sehingga tercapainya tujuan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Namun, perlu disadari bahwa praktek calo merupakan ilegal karena calo seringkali meminta bayaran lebih, baik dari salah satu maupun kedua belah pihak.

Selain dilakukan oleh aparat instansi resmi pemerintah, penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk menjadi TKI maupun TKW juga melibatkan calo-calo tenaga kerja dalam proses di dalamnya. Baik calo tenaga kerja yang ditunjuk oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS adalah nama lain dari PJTKI) resmi maupun calo tenaga kerja yang sifatnya ilegal. Beberapa PPTKIS membutuhkan jasa calo tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan akan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Keterbatasan PPTKIS terutama dalam hal tenaga lapangan menyebabkan perusahaan yang bersangkutan harus tergantung pada jasa calo tenaga kerja yang berarti juga

[22] Anton M. Moeliono, *Tata Bahasa Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), Hlm. 147

"menggadaikan" kreadibilitas perusahaannya. Jalan ini diambil karena jika dalam batas waktu yang telah ditentukan perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan akan calon tenaga kerja, maka resiko denda pun juga terpaksa harus dihadapi. Untuk itu, dalam berbagai proses perekrutan oleh calo-calo tenaga kerja yang bertindak sebagai petugas lapangan perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan karena dianggap sebagai resiko calon tenaga kerja migran.[23] Secara umum ketergantungan perusahaan pengerah jasa terhadap calo tenaga kerja sesungguhnya disebabkan oleh dua hal, yaitu tingkat persaingan yang tinggi antar perusahaan pengerah jasa dan kecenderungan orientasi bisnis yang besar dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi.[24]

Depnaker (Departemen Tenaga Kerja) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai penyalur informasi kesempatan kerja yang ada di dalam dan di luar negeri. Lembaga ini juga menyiapkan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akan disalurkan. Pelatihan semacam itu juga diberikan oleh lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja swasta yang bernaung di bawah Depnaker dan atas pengawasan Depnaker. Lembaga-lembaga swasta ini pada dasarnya membantu calon tenaga kerja memperoleh

[23] Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 69-70
[24] *Ibid*,. Hlm. 67

pekerjaan dengan mengambil sedikit keuntungan dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para calon tenaga kerja.[25]

Peran penting calo tenaga kerja terutama terlihat dalam tiga hal. Pertama, pada saat perekrutan calon migran; kedua, pendanaan awal bagi migran yang tidak memiliki biaya dengan memberikan pinjaman dan ketiga, peran calo tenaga kerja sebagai calo yang menawarkan jasa tenaga kerja diberbagai daerah atau negara tujuan. Calo tenaga kerja pada umumnya menarik simpati calon migran dari kelompok masyarakat ekonomi bawah dan menarik mereka kedalam jaringan yang sangat sulit untuk dihindari. Calo tenaga kerja Indonesia menciptakan suatu keadaan akan adanya ketergantungan oleh calon migran. Hal itu menyebabkan calon migran tidak mampu menghindar.[26]

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, bahwa prosedur pelayanan program migran yang dilakukan oleh beberapa migran tenaga kerja melalui pihak pemerintah dirasakan masih terlalu birokratis (berbelit-belit), tidak efisien karena menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit dengan waktu tunggu pemberangkatan yang sangat lama, bahkan cenderung tidak pasti, serta menyulitkan calon migran sebagai pengguna program. Sehingga menyebabkan calon migran potensial mengunakan jasa calo tenaga kerja dengan

[25] Abdullah Irawan, *Sangkan Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 180
[26] Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI: Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang: UMM Press, 2006), Hlm. 120

harapan proses bekerja di luar negeri dapat berjalan lebih mudah dan cepat, serta biaya pertama yang dikeluarkan lebih murah. Migran yang menggunakan jalur resmi, dalam kenyataannya selama proses perekrutan, tidak lepas dari jeratan eksploitasi mekanisme calo tenaga kerja terselubung yang dikemas melalui sistem perekrutan sponsor secara resmi yakni PPTKIS.[27]

5. Konsep Peningkatan Status Sosial Ekonomi

Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.[28] Meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya). Meningkatkan juga berarti mempertinggi atau memperhebat. Menurut Soekanto status sosial diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Merujuk dari pengertin tersebut peningkatan status sosial berarti upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk meningkatkan, mempertinggi atau memperhebat taraf hidup di dalam kelompok masyarakat sehingga memiliki tempat dan posisi yang lebih dari semula.

Meningkatan status sosial dapat dilakukan dengan usaha meningkatkan faktor penentu status sosial yang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki perbedaan di tiap wilayah. Seperti

[27] Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 217
[28] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern Press, 1995), hlm. 160.

meningkatkan pendidikan, kekayaan, gaya hidup, pekerjaan dan lain sebagainya sehingga status sosial dapat meningkat di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ada seseorang dalam masyarakat tidak memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah, kemampuan dan statusnya karena mereka sudah mendapatkan kedudukan tersebut karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula.

Status (kedudukan) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status merupakan kerangka dasar kita untuk hidup dalam masyarakat.[29] Sedangkan status sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiaban-kewajibannya.[30] Majer dalam Soekanto mengatakan status sosial ekonomi adalah kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.[31] Berdasarkan beberapa pengertian tersebut status sosial ekonomi ialah posisi seseorang di dalam masyarakat atau kelompok sosial, penentunya adalah faktor dan unsur ekonomi.

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status

---

[29] James, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi* (Jakarta : Erlangga. 2006), hlm. 92.
[30] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 210.
[31] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.207

pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.[32]

a. Jenis Status Sosial

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua jenis status sosial, yaitu sebagai berikut:[33]

1) *Ascribed Status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula.
2) *Achieved Status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang di sengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi terbuka bagi siapa saja, tergantung dari masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.

Polak dalam Soekanto menyebutkan bahwa kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *assigned-status*, yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned-status* sering mempunyai hubungan erat dengan *achieved-status.* Artinya suatu

[32] Abdul Syani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 93.
[33] Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Op.Cit.*, hlm. 210-211.

kelompok atau golongan memberikan kedudukan lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan seseorang karena telah lama menduduki suatu kepangakatan tertentu, misalnya seorang pegawai negeri seharusnya naik pangkat secara reguler, setelah menduduki kepangkatannya yang lama, selama jangka waktu tertentu.

b. Faktor Penentu Status Sosial Ekonomi

Posisi seseorang dikatakan memiliki tingkatan status sosial ekonomi atas atau bawah di dalam masyarakat penentunya adalah faktor dan unsur ekonomi. Tingkatan status sosial kelas atas adalah orang yang memiliki gaya hidup yang paling dapat diterima, berpendidikan tinggi, dan memegang posisi dengan gengsi sosial yang tinggi pula, serta anak keturunan orang yang berstatus sosial tinggi itu. Weber membedakan empat faktor yang menentukan status sosial, yaitu:[34]

1) Gaya hidup atau cara hidup.
2) Pendidikan atau latihan formal berkenaan dengan kemampuan.
3) Asal-usul keturunan.
4) Gengsi pekerjaan.

[34] Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989) hlm.12.

Soekanto memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria tersebut diantaranya ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetehuan. Namun status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1) Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya.[35]

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Dalam kaitan ini Soeroto memberikan difinisi mengenai pekerjaan adalah "kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak". Dengan bekerja seseorang akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini memberikan kepadanya dan

[35] *Ibid*, hlm. 146.

keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas.

2) Pendidikan

Pendidikan menurut Soerjono Soekanto: "Pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya (seefektif dan seefisien mungkin) dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi".[36]

Pendidikan merupakan upaya untuk mengarah pada tercapainya perkembangan yang dapat merangsang suatu cara berfikir yang rasional, kreatif dan sistematis. Sehingga pendidikan dapat memperluas keilmuan, meningkatkan kemampuan dan potensi serta membuat seseorang lebih peka terhadap setiap gejala-gejala sosial yang muncul.

3) Pendapatan

Christoper dalam Sumardi mendefinisikan pendapatan berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

[36] *Ibid,*. Hlm. 143

4) Jumlah Tanggungan Orang Tua

Proses pendidikan anak dipengaruhi oleh keadaan keluarga sebagai berikut: *pertama* adalah ekonomi orang tua yang banyak membantu perkembangan dan pendidikan anak. *Kedua* adalah kebutuhan keluarga, kebutuhan keluarga yang dimaksud adalah kebutuhan dalam struktur keluarga yaitu adanya ayah, ibu dan anak. *Ketiga* adalah status anak, apakah anak tunggal, anak kedua, anak bungsu, anak tiri, atau anak angkat. Jumlah tanggungan orang tua yaitu berapa banyak anggota keluarga yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan, yaitu 1 orang, 2 orang, 3 orang, lebih dari 4 orang.

5) Pemilikan

Pemilikan barang-barang yang berhargapun dapat digunakan untuk ukuran tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga seperti rumah dan tanah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi dan mereka semakin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.

Apabila seseorang memiliki tanah sendiri, rumah sendiri, sepeda motor, mobil, komputer, televisi dan tape biasanya mereka termasuk golongan orang mampu atau kaya. Apabila seseorang belum mempunyai rumah dan menempati rumah dinas, punya kendaraan, televisi, tape, mereka termasuk

golongan sedang. Sedang apabila seseorang memiliki rumah kontrakan, sepeda dan radio biasanya termasuk golongan biasa.

6) Jenis Tempat Tinggal

Menurut Kaare Svalastoga dalam Sumardi untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:

a) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain.
b) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada umumna menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen.
c) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.

Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondiri sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang

kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

Namun, menurut Koentjaraningrat pembedaan status orang dalam tiap masyarakat manusia tidak sama. Hal itu sebenarnya berarti bahwa alasan-alasan yang diterima oleh pandangan umum dalam suatu masyarakat untuk mengukur status apakah yang tinggi, dan status apakah yang rendah dalam masyarakat itu, berbeda dengan masyarakat lain. Dalam satu masyarakat misalnya, kekuasaanlah menjadi alasan pembeda, sehingga orang yang berkuasa dipandang tinggi dan orang yang tidak berkuasa dipandang rendah; dalam masyarakat lain kepandaianlah menjadi alasan pembeda, sehingga orang yang berpengetahuan dipandang tinggi, sedangkan orang yang tak berpengetahuan dipandang rendah; dalam masyarakat lain lagi, kekayaanlah menjadi alasan pembeda, sehingga orang yang kaya dipandang tinggi, dan orang yang miskin dipandang rendah.[37] Sehingga untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat tidaklah sama disetiap daerah karena tolak ukur penentu status sosialnya pun berbeda.

6. Konsep Interaksi Sosial

Pada hakikatnya manusia tidak hanya sebagai makhluk inidividu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Untuk menjalani

[37] Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm 181.

kehidupannya manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya, oleh karena itu manusia melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi maka tak akan mungkin ada kehidupan bersama.[38] Harlod Bethel menjelaskan bahwa *the basic condition of a common life* dapat tercermin pada faktor-faktor berikut:[39]

1. *Grouping of people*, artinya adanya kumpulan orang-orang.
2. *Definite place*, artinya adanya wilayah/tempat tinggal tertentu.
3. *Mode of living*, artinya adanya pemilihan cara-cara hidup.

Interaksi merupakan bentuk utama dari proses sosial, aktivitas sosial terjadi karena adanya aktivitas dari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Yang bertindak, yang berhubungan itu adalah manusia.[40] Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok.[41]

---

[38] Soerjono Soekanto, *Soiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 54
[39] Slamet Santosa, *Dinmika Kelompok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.10-11
[40] Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.110
[41] Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm.55

a. Unsur Dasar Interaksi Sosial

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:[42]

1) Adanya kontak sosial (*social-contac*)

Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* (yang artinya bersama-sama) dan *tango* (yang artinya menyentuh), jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Pada interaksi sosial mengandung makna tentang kontak sosial secara timbal balik atau inter-stimulansi dan respon antara indivdiu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain.[43]

Kontak sosial dapat bersifat posistif ataupun negatif. Yang bersifat positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada sutau pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan sutau interaksi sosial. Suatu kontak sosial dapat pula bersifat primer ataupun sekunder.

Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sedangkan kontak

---

[42] Soerjono Soekanto, ”Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum. Hukum Nasional Nomor 25. 1974, dalam Soerjono Soekanto, *Soiologi suautu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.58

[43] Soleman B. Taneko, *op. cit.*, hlm.110

yang sekunder memerlukan sutau perantara. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:[44]

a) Antara orang perorangan.

b) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya.

c) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

2) Adanya Komunikasi

Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung. Komunikasi timbul apabila seseorang individu memberi tafsiran pada perilau orang lain. Dengan tafsiran tersebut, lalu seorang itu mewujudkan perilaku, dimana perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.[45]

Komunikasi merupakan awal mula terjalinnya suatu hubungan, baik hubungan kerjasama ataupun hubungan apapun itu dalam kehidupan manusia. Di sisi lain komunikasi juga terkadang mengakibatkan sutau pertentangan atau pertikaian. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman atau masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah ketika berkomunikasi satu sama lain.

[44] Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 62
[45] Soleman B. Taneko, *op. cit.*, hlm. 111

b. Faktor-faktor Proses Interaksi Sosial

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor, antara lain:[46]

1) *Imitasi*, adalah suatu proses meniru seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain.
2) *Sugesti*, faktor ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.
3) *Identifikasi*, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.
4) *Simpati*, suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain.

c. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Di dalam interaksi disamping memiliki unsur dasar yakni, kontak sosial dan komunikasi, juga memiliki beberapa bentuk. Bentuk interaksi sosial bisa berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) bahkan dapat juga berbentuk pertentangan (*conflict*).[47] Banyak tokoh yang mengidentifikasikan beberapa bentuk dari interaksi sosial tersebut. Gillin dan Gillin dalam Soekanto mengidentifikasikan interaksi sosial itu dalam dua bentuk, yakni: proses yang asosiatif dan disosiatif.

---

[46] Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 57
[47] *Ibid.*, hlm. 64

Proses asosiatif ini terbagi menjadi tiga bentuk khusus lagi, yakni:

1) Kerja sama

Kerja Sama merupakan sebuah proses dimana terjadi sebuah kesadaran adanya kepentingan dan tujuan yang sama di dalamnya yang kemudian melakukan sebuah tindakan guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Bentuk kerjasama ada kesediaan dari anggota kelompok untuk mengganti kegiatan anggota kelompok lainnya karena kegiatan yang dilaksanakan saling bergantung dengan kegiatan yang lain dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan bersama.[48]

Kerja sama dibagi menjadi lima bentuk yaitu *pertama*, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. *Kedua*, bergaining atau yang biasa disebut dengan suatu proses perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa. *Ketiga*, kooptasi yaitu suatu proses dimana terjadi penerimaan unsur-unsur baru guna menciptakan suatu stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. *Keempat*, koalisi adalah suatu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. *kelima*, joint venture merupakan sebuah proses kerjasama dalam sebuah proyek tertentu.

[48] Slamet Santosa, *op.cit.*, hlm. 22

2) Akomodsi

Akomodasi adalah sebuah bentuk usaha untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat akibat perbedaan paham atau pandangan. Mencegah timbulnya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau temporer.[49] Akomodasi juga mengupayakan peleburan antara kelompok-kelompok yang terpisah dan bahkan memungkinkan terjadinya sebuah kerjasama di dalamnya. Dalam hal ini akomodasi diterapkan dalam masyarakat yang cenderung mengenal adanya sebuah kasta akibat faktor sosiologis dimana mereka terkotak-kotak dalam kelasnya masing-masing.

3) Asimilasi

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.[50] Dalam konteks ini proses asimilasi harus didukung dengan adanya sebuah toleransi para pelakunya, namun terkadang proses asimilasi sendiri terhambat karena faktor

[49] *Ibid.,* hlm. 69
[50] *Ibid.,* hlm. 81

kehidupan masyarakat yang terisolasi, yang cenderung mempunyai pengetahuan yang relatif rendah.

Sedangkan proses disosiatif atau juga disebut dengan oppositional processes terdiri dari:

1) Persaingan (*competition*)

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa jadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman.[51] Persaingan sendiri dalam hal ini meliputi berbagai hal yaitu persaingan ekonomi, budaya, kedudukan atau peran, dan juga kesukuan/ras. Adapun fungsi dari persaingan salah satunya adalah untuk menyalurkan sebuah keinginan individu yang bersifat kompetitif dalam masyarakat, yang kemudian secara output dengan adanya persaingan timbul sebuah perubahan sosial dimana akan merujuk pada sebuah kemajuan masyarakat.

2) Kontravensi (*contravention*)

Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian

[51] *Ibid.,* hlm. 87

kontraversi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang- orang lain atau terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur- unsur kebudayaan golongan tertentu.[52] Kontravensi ini identik dengan sebuah perbuatan penolakan dan perlawanan yang memungkinkan terjadinya sebuah penghasutan untuk menjatuhkan lawan-lawanya. Menurut von Wiese dan Backer, terdapat tiga tipe umum kontravensi, yaitu kontravensi generasi masyarakat, kontravensi yang menyangkut seks dan kontravensi parlementer.[53]

3) Pertentangan (*conflict*)

Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan sebuah acmanan atau kekerasan. Di dalam diri seseorang biasanya terdapat sejumlah kebutuhan dan peran yang saling berkompetisi, berbagai macam cara untuk mengekspresikan usaha dan peran, berbagai macam halangan yang terjadi antara usaha dan tujuan, dan juga adanya aspek-aspek positif dan negatif yang terkait dengan tujuan yang

[52] Ibid., hlm. 90
[53] Leoplod von Weise dan Howard Backer: *Sysmatic Sociology*, (New York: John R.Willy & Sons, 1932), bab 19. Tersedia pada Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88

diinginkan.[54] Secara umum terjadinya pertentangan dikarenakan adanya sebuah perbedaan yang sangat mencolok, mulai dari perbedaan individu, kepentingan hingga perbedaan sosial. Konflik dalam kelompok pun sering disebabkan oleh tidak sesuainya tujuan, perbedaan-perbedaan imterpretasi dari berbagai fakta, ketidasetujuan yang didasarkan pada bermacam ekspetasi perilaku.

Pertentangan dalam hal ini tidak serta merta bersifat negatif, namun juga bersifat positif. Dalam hal ini dijelaskan mengenai akibat-akibat dari bentuk pertentangan yaitu yang bersifat positif adalah terjadi sebuah solidaritas dalam suatu kelompok dan kemudian memungkinkan terjadinya perubahan kepribadian, sedangkan yang bersifat negatif adalah goyah atau retaknya kesatuan sosial masyarakat yang memungkinkan terjadinya perpecahan atau disorganisasi.

Masalah sosial tidak muncul secara alami, namum masalah sosial ada karena "*social creation*", yang tercipta sebagai hasil dari pemikiran manusia dalam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terwujud dari peranan-perenannya yang terwujud karena interaksi sosial dalam suatu arena tertentu.[55]

---

[54] Makmuri Muchlas, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.449

[55] Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping Metode Pemetaan Sosial*. (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), hlm. 49

Perwujudan interaksi sosial tidak hanya bersifat positif saja, melainkan juga bersifat negatif berupa masalah-masalah sosial. Bentuk interaksi sosial yang bersifat disasosiatif merupakan bagian di dalamnya yang pembahasannya adalah, dimana setiap kerangka perubahan yang terjadi pasti terdapat proses yang kadang kala dimulai dengan adanya benturan-benturan satu sama lain dan kondisi ini dapat berupa kontravensi bahkan pertentangan.

F. Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian ini yang berjudul "Upaya Meningkatkan Status Sosial Ekonomi dengan Menjadi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri. Studi kasus Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu". Penelitian yang serupa juga pernah diteliti oleh beberapa orang, di antaranya:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indah Wulandari (2013)	Pola Perilaku Konsumtif Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ketika Kembali Ke Daerah Asal Di Kabupaten Blitar	Penelitian Kualitatif	Perilaku konsumtif yang dilakukan oleh TKW dipengaruhi oleh adanya hegemoni dari persepsi masyara-kat tentang TKW, selalu menganggap TKW sukses dan memiliki uang banyak. Akhirnya, hanya untuk memenuhi anggapan masyarakat dan itu mengejar prestise, para TKW mengabaikan kebutuhan mereka yang sebenarnya, tidak ada investasi untuk masa depan sehingga kehidupan mereka tidak mengalami kemajuan.	Meneliti Tentang TKW dan penggunaan pendapatannya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat.	Lokasi penelitian Indah Wulandari di Kabupaten Blitar sedangkan pelelitian ini dilakukan di Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel. Selain itu Penelitian ini juga tidak hanya menganalisis pola konsumtifitas TKW dan keluarganya tetapi Upaya TKW dalam meningkatkan status sosialnya.
2.	Oktavia Djabu	Peranan Ibu Rumah	Penelitian Kualitatif	Meningkatkan status sosial keluarga merupakan	Meneliti tentang	Penelitian Oktavia Djabu

	(2013)	Tangga yang Bekerja Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado.		salah satu faktor pendorong bekerjanya seorang ibu rumah tangga. Hasil uraian menunjukkan bahwa bakerjanya seorang ibu rumah tangga dapat meningkatkan status sosial ekonomi keluarga.	peningkatan status sosial yang dilakukan oleh Perempuan yang bekerja.	berfokus kepada Ibu rumah tangga yang bekerja. Sedangkan peneliti berfokus pada TKW yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga.
3.	Rifa Agustini (2010)	Karakteristik Tenaga Kerja Wanita (TKW) Yang Pernah Bekerja Ke Luar Negeri dan Dampak Remitensi Terhadap Keluarga TKW di Kecamatan Sepulu	Penelitian Kualitatif	Pemanfaatan Remiten oleh keluarga di daerah asal selama menjadi Tenaga Kerja Wanita adalah sebagian besar untuk biaya pendidikan anak dan setelah menjadi Tenaga Kerja wanita sebagian besar digunakan untuk membangun rumah.	TKW menjadi informan dan mencari informasi mengenai penggunaan pendapatan yang didapatkan oleh TKW (Reminten).	Pada penelitian Rifa Agustini tidak dikaitkan dengan interaksi yang dilakukan oleh calo.
4	Feri Kristiana Wati (2011)	Peran Calo Tenaga Kerja Dalam Proses Penyaluran TKI/TKW Ke Luar Negeri	Kualitatif	Peran calo dalam proses penyaluran TKI/TKW asal desa Karangrowo ke luar negeri sangatlah dominan dan penting. Dampak positifnya adalah proses yang dilalui untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri dapat berjalan dengan mudah, lancar, dan cepat dibandingkan jika harus mengurus segala	Menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi subjek dan oblek penelitian adalah Calo dan Tenaga Kerja Indonesia.	Peneliti memfokuskan pada Tenaga Kerja Wanita, sedangakn penelitian Feri Kristina Wati adalah TKI (pria dan wanita). Peneliti juga mengambil pembahasan mengenai

				sesuatunya sendiri. Dampak negatifnya adalah muncul berbagai persoalan sejak perekrutan hingga kepulangan ke tanah air (tindak penipuan, pemerasan, kekerasan fisik, dan eksploitasi)		interaksi dan peningkatan status sosial sedangkan penelitian Feri Kristina yaitu, peran calo dalam penyaluran TKI.